

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, putus sekolah telah menjadi bagian persoalan utama. Sebab ketika membicarakan pendidikan maka hal ini tidaklah lepas dari arti pentingnya pendidikan bagi manusia karena pada hakikatnya pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Selain itu proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (*driving forces*) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Pada masa sekarang ini pendidikan memegang peranan penting dan merupakan suatu kebutuhan utama bagi setiap individu. Akan tetapi pada saat orang-orang berlomba untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Di sisi lain ada sebagian masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak, baik dari tingkat dasar maupun sampai ke jenjang yang lebih tinggi sebagai hak dasar atau hak pokok yang dikaruniai oleh Allah SWT kepada manusia sejak lahir. Hak atas pendidikan yang layak diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28 C: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 dinyatakan bahwa: "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu".

Dari beberapa Undang-undang yang menyangkut pendidikan seperti yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia atas pendidikan yang layak sudah sangat tegas diatur, setidaknya sebagai warga

negara yang sadar hukum kita sama-sama berusaha untuk menghormati dan menjunjung hak asasi manusia lain, khususnya atas hak pendidikan.

Sesuai hasil survei nasional pada tahun 2010, Angka Partisipasi Sekolah (APS), *ratio* penduduk yang bersekolah berdasarkan kelompok usia sekolah masih belum sesuai yang diharapkan. Survei nasional menunjukkan bahwa APS untuk penduduk usia 7–12 tahun sudah mencapai 96,40%, namun APS penduduk usia 13-15 tahun baru mencapai 81%, Angka tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 19% anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Data survei nasional mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah tidak melanjutkan pendidikan (75,7%), karena kebutuhan murid jauh lebih besar dibandingkan dengan iuran sekolah. Kemudian pada tahun 2014 sesuai hasil survei nasional bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS), mulai mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari APS untuk penduduk usia 7–12 tahun mencapai angka pada 98,34%, dan APS penduduk usia 13-15 mencapai 91%, Angka tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 16,8% anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkatan Umur**

<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut tingkatan umur</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
APS 7-12 Thn	96,4%	97,9%	97,53%	97,64%	98,34%
APS 13-15 Thn	81%	86,11%	87,79%	89,61%	91,00%
APS 16-18 Thn	55,05%	55,83%	57,69%	61,30%	63,64%
APS 19-24 Thn	12,66%	13,67%	14,47%	15,94%	20,04%
Tidak/Belum Sekolah	7,50%	7,28%	6,73%	6,11%	5,77%
Tidak Tamat SD	19,00%	12,74%	15,08%	14,30%	16,8%

(Sumber: BPS-RI, Susenas 2010-2014. Data tahun 2010-2014 diestimasi dengan menggunakan inflasi hasil back-casting berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035)

Saroni (2010: 27) menemukan bahwa alasan-alasan utama yang diberikan untuk tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah adalah alasan ekonomi (lebih 70%) yang menyebabkan keluarga tidak mampu membiayainya. Saroni juga mencatat bahwa perlu bekerja banyak disebut sebagai salah satu alasan untuk tidak bersekolah, namun demikian hanya 20% dari mereka yang mengemukakan alasan perlu bekerja akhirnya benar-benar bekerja..

Ada banyak faktor yang menyebabkan putus sekolah seperti keterbatasan dana pendidikan karena kesulitan ekonomi, kurangnya fasilitas pendidikan dan karena adanya faktor lingkungan (pergaulan). Pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, sampai saat ini kenyataannya ditanggung oleh orang tua murid, akibatnya sekolah memungut berbagai iuran dan sumbangan kepada orang tua murid, sehingga pendidikan menjadi mahal dan hanya menyentuh kelompok masyarakat menengah ke atas. Anak-anak dari kelompok keluarga tidak mampu tidak sanggup membiayai sekolah anaknya, oleh karena itu langkah Pemerintah dengan membebaskan pembiayaan pendidikan kepada orang tua murid tidaklah tepat, sebab mereka yang tidak mampu lebih memilih untuk tidak meneruskan sekolah anaknya dan lebih diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Hampir di setiap tempat banyak anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau pendidikan putus di tengah jalan disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi alasan utama antara lain faktor internal maupun faktor eksternal seperti faktor ekonomi orang tua sehingga menjadi penghambat bagi seseorang untuk memenuhi keinginannya dalam melanjutkan pendidikan. Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya tidak mempunyai keterampilan khusus, orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap, keterbatasan kemampuan dan faktor lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis termotivasi untuk meneliti permasalahan ini sehingga dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, dengan menetapkan sebagai judul adalah: “Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara” juga

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Universitas Negeri Gorontalo.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Memperhatikan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berkaitan dengan Faktor-faktor Penyebab

Putus Sekolah di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai berikut:

1. Banyaknya anak putus sekolah di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya
2. Faktor eksternal dan internal penyebab anak putus sekolah dasar di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya

## **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah dasar di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya

## **1.5 Manfaat penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis.

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah kepada warga masyarakat tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan.
2. Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan peneliti lainnya, khususnya yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan keberadaan Anak Putus Sekolah.
3. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan peneliti dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bidang PLS terutama yang berkaitan dengan Faktor-faktor Penyebab Anak Putus Sekolah, sekaligus merupakan latihan dalam menulis karya ilmiah dalam rangka membentuk sikap ilmiah.

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi seluruh warga masyarakat dalam menanggulangi Anak Putus Sekolah di Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.